



## Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik

Rendalia Putri<sup>1</sup>, Agus Sutarjo<sup>2</sup>, Desmiwerita<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [rendaliaputri@gmail.com](mailto:rendaliaputri@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [bejoagusdr@yahoo.co.id](mailto:bejoagusdr@yahoo.co.id)

<sup>3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [desmiwerita13@gmail.com](mailto:desmiwerita13@gmail.com)

Corresponding Author: Rendalia Putri

**Abstract:** *This study aims to determine the effect of the presentation of financial reports, accessibility of financial reports, and functional supervision on public accountability in agencies and services that are members of regional apparatus organizations in the Agam Regency Government either partially or simultaneously. Methods of data analysis in this study using multiple regression. The results of this study indicate that: 1) Based on the t-test it is known that the variable presentation of financial statements influences public accountability. 2) Based on the t-test, it is known that the variable accessibility of financial reports influences public accountability. 3) Based on the t-test it is known that the variable of functional supervision affects public accountability. 4) Based on the F test it is known that the variables of presentation of financial statements, accessibility of financial reports, and functional supervision have a simultaneous effect on public accountability.*

**Keywords:** *Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements, Functional Oversight, Public Accountability.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada badan dan dinas yang tergabung dalam organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Agam baik secara parsial maupun secara simultan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. 2) Berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. 3) Berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. 4) Berdasarkan uji F diketahui bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas

laporan keuangan, dan pengawasan fungsional berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas publik.

**Kata Kunci:** Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik.

---

## PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik di Sumatera Barat khususnya Kabupaten Agam telah mengalami perkembangan yang pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat. Akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem yang digunakan oleh lembaga-lembaga sektor publik sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban yang ditujukan kepada publik. Praktek akuntansi menjadi sorotan tajam yang harus diperhatikan oleh suatu lembaga sektor publik. Oleh karenanya, lembaga sektor publik dituntut agar lebih memperhatikan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan aktivitasnya dan menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan privatisasi guna menciptakan good publik and good governance.

Sejalan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya kita menginginkan terwujudnya suatu pemerintahan yang good governance. Untuk mewujudkan pemerintah yang good governance tersebut terdapat tiga prinsip yang harus dipenuhi diantaranya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dari ketiga prinsip tersebut, akuntabilitas menjadi elemen terpenting dan utama sekaligus menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah (Maria, 2016).

Dengan semangat pelaksanaan akuntabilitas, dorongan terhadap kebutuhan akan pengukuran kinerja pemerintah juga meningkat. Akuntabilitas kinerja instansi merupakan salah satu bagian dari isu kebijakan yang strategis di Indonesia. Perbaikan akuntabilitas pada instansi pemerintah akan berdampak luas terhadap bidang ekonomi maupun politik. Sehingga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi melalui laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

Kabupaten Agam merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang harus untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitasnya. Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilakukan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi setiap tahunnya diketahui bahwa LAKIP Kabupaten Agam selama tahun 2009 sampai dengan 2013 menunjukkan hasil dengan kategori cukup. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pada pemerintah Kabupaten Agam belum terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan publik ([www.agamkab.go.id](http://www.agamkab.go.id)).

Hal ini juga merujuk kepada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas LKPD Kabupaten Agam Tahun 2015 yang disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2015, dalam penyajian laporan realisasi anggaran masih dilakukan melalui proses konversi karena adanya perbedaan struktur APBD dengan struktur pelaporan, perbedaan penamaan dan format laporan keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Agam melakukan konversi yang tidak hanya terbatas kepada format pelaporan saja, namun juga diupayakan agar

definisi dari setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan (Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Agam Tahun 2015).

Berdasarkan kondisi yang terjadi di Kabupaten Agam, menjadikan belum maksimalnya pemerintah daerah dalam memberikan laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban atas aktivitasnya. Disamping itu, hal ini juga menunjukkan rendahnya akuntabilitas publik pada pemerintahan tersebut.

Permasalahan lain yang juga menjadi kendala dalam meningkatkan akuntabilitas publik di Kabupaten Agam adalah aksesibilitas dari laporan keuangan yang belum berjalan optimal. Aksesibilitas merupakan kemudahan publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif juga bergantung pada kemudahan publik dalam mendapatkan informasi laporan keuangan.

Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola secara langsung keuangan daerahnya berhak mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan tersebut sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2009 dalam Hehanussa,

2015). Pada realitanya, masih sedikit pemerintah daerah yang memberikan kemudahan kepada publik dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tersebut, sehingga hal ini cenderung ditutup-tutupi dan dirahasiakan dari masyarakat dan hanya dijadikan konsumsi bagi sebagian kalangan saja.

Dengan masih adanya aparat pemerintah yang terjerat dalam kasus korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi cerminan lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga sektor publik. Shella (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik yang baik juga dapat diwujudkan dengan adanya pengawasan fungsional internal yang efisien dan efektif. Dengan adanya pengawasan fungsional ini dapat membantu publik untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintah sudah melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku sehingga menjamin terbebas dari kepentingan perseorangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang sering muncul terkait dengan pelaksanaan akuntabilitas publik saat ini khususnya di Kabupaten Agam adalah pertama belum seluruh OPD dapat menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Kedua, belum seluruh pemerintah daerah dapat memberikan kebebasan dan kemudahan akses laporan keuangan baik melalui media cetak maupun media online. Ketiga, lemahnya kontrol pengawasan dari atasan terhadap pelaksanaan internal pemerintahan sehingga masih ditemukan beberapa penyimpangan dari pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Empiris Pada Badan dan Dinas yang Tergabung Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Agam)”.

## METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang sudah didapatkan (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sugiyono (2015) menjelaskan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau keterangan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2015). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Uma Sekaran (2013: halaman 113) data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti pada variabel minat untuk tujuan khusus penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada responden pegawai pemerintah Kabupaten Agam.

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji T. Uji T dilakukan untuk menguji apakah suatu variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dan juga untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel untuk mengambil keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis penelitian yang sebelumnya telah penulis buat. Untuk pengujian hipotesis 1, 2, 3, dan 4 dilakukan Uji t, Uji t yaitu menguji koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Uji T dalam penelitian ini untuk menguji H1, H2, H3, dan H4. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Imam Ghozali (2016: 98) adalah jika p value < 0,05 maka  $H_a$  diterima. Sebaliknya, jika p value > 0,05 maka  $H_a$  di tolak.

Pengujian hipotesis secara serempak (simultan) antara variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (Y), digunakan Uji Fisher (Uji-F). Setelah diperoleh nilai Fhitung, selanjutnya dibandingkan dengan nilai Ftabel, dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1.  $H_0$  ditolak jika  $F_0 \geq F_{tab}$  atau  $Sig < 0,05$ . Hal ini berarti variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara simultan.
2.  $H_0$  diterima jika  $F_0 < F_{tab}$  atau  $sig > 0,05\%$ . Hal ini berarti variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara simultan. Dalam penelitian ini, hasil pengolahan data didapatkan dengan menggunakan program pengolahan data statistik SPSS versi 24.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji T

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, hasil uji t untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Nilai t hitung variabel penyajian laporan keuangan adalah 3,605 dan nilai ( $sig = 0,001 < 0,05$ ). Dengan  $df = 96-4 = 92$  maka diperoleh nilai ttabel sebesar 1,661. Dari hasil diatas

dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $3,605 > 1,661$   $sig < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, sehingga variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

2. Nilai  $t_{hitung}$  variabel aksesibilitas laporan keuangan adalah 3,824 dan nilai ( $sig = 0,000 < 0,05$ ). Dengan  $df = 96-4= 92$  diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,661. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $3,824 > 1,661$ ,  $sig < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, sehingga variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Nilai  $t_{hitung}$  variabel pengawasan fungsional adalah 3,670 dan nilai ( $sig = 0,000 < 0,05$ ). Dengan  $df = 96-4= 92$  diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,661, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $3,670 > 1,661$ ,  $sig < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterimasehingga variabel pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

**Tabel 1. Uji t**

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.732	3.908		-.187	.852
	Penyajian Laporan Keuangan	.436	.121	.352	3.605	.001
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	.707	.185	.259	3.824	.000
	Pengawasan Fungsional	.396	.108	.354	3.670	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber: data diolah penulis, 2020

Berdasarkan tabel 1 diatas, maka hasil uji t untuk masing-masing variabel adalah :

1. Nilai  $t_{hitung}$  variabel penyajian laporan keuangan adalah 3,605 dan nilai ( $sig = 0,001 < 0,05$ ). Dengan  $df = 96-4= 92$  maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,661. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $3,605 > 1,661$   $sig < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, sehingga variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
2. Nilai  $t_{hitung}$  variabel aksesibilitas laporan keuangan adalah 3,824 dan nilai ( $sig = 0,000 < 0,05$ ). Dengan  $df = 96-4= 92$  diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,661. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $3,824 > 1,661$ ,  $sig < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, sehingga variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Nilai  $t_{hitung}$  variabel pengawasan fungsional adalah 3,670 dan nilai ( $sig = 0,000 < 0,05$ ). Dengan  $df = 96-4= 92$  diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1,661, dari hasil di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $3,670 > 1,661$ ,  $sig < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterimasehingga

variabel pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

### Uji F

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh secara keseluruhan dari tabel independen dengan table independent. Dengan bantuan program SPSS V.24.00 diketahui nilai F hitung pada tabel Anova dibawah ini :

**Tabel 2. Hasil Uji Kelayakan (Uji F)**

ANOVAa						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3040.424	3	1013.475	58.369	.000b
	Residual	1597.410	92	17.363		
	Total	4637.833	95			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Fungsional, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan

Sumber: data diolah penulis, 2020

Berdasarkan uji F diketahui bahwa nilai F hitung 58,369 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ( $p < 0,05$ ). Dengan F tabel  $(n-k-1) = (96-4-1) = 91$  diperoleh Ftabel sebesar 2,70. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $58,369 > 2,70$  dan nilai sig. yang dihasilkan dari perhitungan adalah 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha$  yang digunakan sebesar 0,05.

Hal ini berarti secara bersama-sama variable persepsi penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengawasan fungsional berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas publik pada Badan dan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

### Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik

Sebagai organisasi yang mengeloladana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggung jawaban publik melalui laporan keuangannya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial, informasi berupa laporan keuangan seharusnya merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas (Nordiawan, 2010).

Sebagai entitas yang menggunakan dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggung jawaban publik melalui laporan keuangannya. Dengan penyajian laporan keuangan baik dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam peningkatan akuntabilitas publik harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan dikatakan memenuhi standar akuntansi pemerintah apabila laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif informasi yaitu: relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi

dalam laporan keuangan yang andal adalah informasi yang dapat diandalkan dalam proses pengambilan keputusan.

Dimana informasi disajikan secara jujur, dapat diuji dan memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan. Hal tersebut digunakan sebagai acuan dalam peningkatan akuntabilitas publik. Disamping itu, sebagai wujud pertanggung jawaban penyajian laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dapat dibandingkan dalam hal ini laporan keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain dan periode sebelumnya, sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan, kegiatan, dan aktivitas yang dilakukan. Laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas publik apabila laporan tersebut dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. dalam hal laporan keuangan disajikan sesuai dengan istilah dan batas pemahaman penggunaannya.

Semakin baik penyajian laporan keuangan akan dapat memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui penyajian laporan keuangan yang baik, pelaporan keuangan daerah akan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laksana (2014) serta Shella dkk (2017) yang menyatakan bahwa hasil penelitian mereka mengenai penyajian laporan keuangan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Disini pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan dengan hasil ini bisa dikatakan pemerintah telah melakukan pertanggungjawabannya kepada masyarakat dalam bentuk penyajian laporan keuangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akuntabilitas publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah atas aktivitas-aktivitas dan kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana akuntabilitas publik memiliki 5 dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan juga akuntabilitas finansial. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam akuntabilitas publik terdapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan melalui dimensi akuntabilitas finansial.

### **Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik**

Hasil penelitian ditemukan Nilai thitung variabel aksesibilitas laporan keuangan adalah 3,824 dan nilai (sig = 0,000 < 0,05). Dengan  $df = 96 - 4 = 92$  diperoleh ttabel sebesar 1.661. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa thitung > ttabel atau  $3,824 > 1.661$  dan  $sig < \alpha$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima maka variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik atau  $H_2$  diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan maka akan mampu meningkatkan

akuntabilitas publik. Dimana pemerintah melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Sehingga melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Suratmi, Nyoman Trisna Herawati, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), Alfin Gustian Akbar (2013), dan Yudi Kristianto (2011) yang menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah adalah menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat luas termasuk informasi keuangan daerah. Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi serta luasnya potensi pemanfaatannya, hal ini membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan memberdayakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban untuk memenuhi hak publik yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Hak publik terkait informasi keuangan tersebut muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*) (Mardiasmo, 2002).

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 103 disebutkan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Disamping melalui penyajian laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi terkait laporan keuangan yang disajikan, karena penyajian laporan keuangan yang baik tidak akan dapat menciptakan akuntabilitas publik secara maksimal tanpa adanya kemudahan akses terhadap laporan keuangan tersebut.

Jadi dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan secara terbuka dan terdapat kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Selain itu aksesibilitas laporan keuangan akan dapat mengatasi masalah *information asymetry* antara masyarakat atau prinsipal yang memberikan amanah kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan padanya. Dimana pemerintah melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Sehingga melalui aksesibilitas laporan keuangan akuntabilitas publik dapat ditingkatkan.

### **Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik**

Hasil penelitian ditemukan Nilai thitung variabel pengawasan fungsional adalah 3,670 dan nilai signifikan 0,000 yang berarti  $< 0,05$ . Dengan  $df = 96-4 = 92$  diperoleh ttabel sebesar 1.661. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa thitung  $>$  ttabel atau  $3,670 > 1.661$  dan signifikan  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima maka variable pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik atau  $H_3$  diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan fungsional yang efektif maka akuntabilitas publik akan terwujud. Sehingga dengan terlaksananya pengawasan fungsional dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cici Rahayu (2011) yang menemukan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dalam mewujudkan akuntabilitas publik, dan juga penelitian yang dilakukan Indah Wulandari (2013) membuktikan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik.

Hal ini dikarenakan tujuan pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggung-jawabkan terhadap publik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta akuntabilitas publik yang baik juga.

Berkaitan dengan Pengawasan fungsional, Inspektorat sebagai salah satu aparat pengawas fungsional memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan. Berdasarkan PP No.60 tahun 2008, inspektorat daerah melakukan pengawasan fungsional intern yaitu seluruh kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya.

Dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengawasan fungsional oleh inspektorat daerah pada khususnya dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baswir (2000, halaman 137) mengatakan bahwa jika pengawasan hanya dilakukan dari pihak internal saja atau metode pengawasan yang digunakan hanya melalui pengawasan melekat saja maka terbukanya kemungkinan kolusi antara pengawas dan pihak yang diawasi sangat besar. Maka dari itu pengawasan fungsional digunakan untuk menunjang agar pengawasan dapat berfungsi secara efektif.

### **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik**

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik menghasilkan nilai Fhitung sebesar 58,369 dengan nilai signifikan 0,000 artinya nilai sig lebih kecil

dari 0,05. Dengan kata lain variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengawasan fungsional secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas publik sehingga hipotesis keempat diterima.

Dalam penelitian yang dilakukan Hehanussa (2015) dalam penelitiannya tentang penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Laksana (2014) juga memberika hasil yang menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik di Kabupaten Batang.

Scott (1997 dalam Kristianto 2011) menyatakan bahwa keberlangsungan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menciptakan informasi yang terbuka seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan adanya pengungkapan informasi tersebut akan dapat mengatasi masalah *information asymetry* antara masyarakat atau pihak konstituen yang memberikan amanah kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Dimana pemerintah melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Dengan demikian melalui aksesibilitas laporan keuangan akuntabilitas publik dapat ditingkatkan.

Penelitian dari Kristianto (2011) tersebut dikembangkan dengan menambahkan variabel bebas lain yang mempengaruhi akuntabilitas publik yaitu penyajian laporan keuangan. Sebagai organisasi yang menggunakan dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif informasi yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan akan dapat meningkatkan akan dapat menciptakan akuntabilitas publik.

Disamping adanya penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengawasan fungsional oleh inspektorat daerah pada khususnya dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hasil empiris ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyana (2006).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik pada badan dan dinas dilingkungan pemerintah Kab. Agam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada badan dan dinas di pemerintah Kab. Agam, dimana variabel penyajian

- laporan keuangan mem iliki nilai thitung 3,605 > ttabel 1,661 dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar  $0,001 < 0,05$ , berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Variabel aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada badan dan dinas di pemerintah Kab. Agam, dimana variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai thitung 3,824 > ttabel 1,661 dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar  $0,000 < 0,05$  dan ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
  3. Variabel pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada badan dan dinas di pemerintah Kab. Agam. Dimana variabel pengawasan fungsional memiliki nilai thitung 3,670 > ttabel 1,661 dan nilai sig. yang diperoleh sebesar  $0,000 < 0,05$  hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
  4. Variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengawasan fungsional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada badan dan dinas di pemerintah Kab. Agam. Berdasarkan hasil uji Fhitung 58,369 > 2,70 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sehingga penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan daerah merupakan salah satu upaya konkrit guna mewujudkan akuntabilitas publik dilingkungan pemerintah daerah Kab. Agam

## REFERENSI

- Agussalim, Manguluang. 2016. *Statistik Lanjutan*. Padang: Ekasakti Press.
- Agussalim, Manguluang, (2016). *Metodologi Penelitian*. padang: Ekasakti Press.
- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Fauziah, M. R., & Nur Handayani. 2017. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 6*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Statistik Non-Parametrik, Teori Dan Aplikasi Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hehanussa, Salomi J. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Ambon). *Jurnal ISSN 2302-9791. Vo. 2.No. 1 May 2015*, UNISSULA.
- Heriawati, N.T., Ni Made Suratmi dkk. 2014. Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI Volume 2 No. 1 Tahun 2014*.
- Idris. 2014. *Analisis Data Kuantitatif*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Indriantoro, Nur. & Bambang Supomo. 2012. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF UGM
- Kurniawati, M.M.H. 2016. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap*

*Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)*. Skripsi.Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.

- Laksana, A.P.& Handayani, B.D. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Batang.*Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765*.Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2009.*Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4.Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang. *Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765*.Universitas Negeri Semarang.
- Nahar, Aida dan Siti Aliyah.2012. Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189*. STIENU Jepara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rahayu, Cici. 2011. *Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik*.Skripsi. Unikom Bandung.
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).*JurnalAkuntansi Universitas Negeri Padang Volume 1 Nomor 1*.
- Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suratmi, N.M., N.T. Heriawati dan N.A.S. Darmawan. 2014. Pengaruh Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 2 No. 1 Tahun 2014)*.
- Wasistiono, Sadu. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Wulandari, Indah. 2013. Pengaruh Pengawasan Fungsional Dalam Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Kota Padang. *Artikel*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.